

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Organisasi Nonlaba

Menurut PSAK 1, entitas nonlaba didefinisikan sebagai sebuah entitas yang memperoleh sumber daya untuk menjalankan aktivitas ekonominya dari para donatur tanpa mengharapkan imbalan yang dibayarkan kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan nilai yang telah diberikan. Ini adalah perbedaan utama antara entitas nonlaba dan entitas yang memiliki sifat komersial.

Menurut Purba et al (2019), entitas nonlaba tidak memiliki tujuan untuk dikomersialisasi untuk mencari laba. Karena tidak digunakan untuk mencari laba, mereka harus menyajikan laporan keuangan (Fauzi, 2019).

Menurut Sri Sapto (2024) organisasi nonlaba dapat didefinisikan secara hukum sebagai organisasi yang tidak dapat membagi aset atau pendapatannya untuk kepentingan dan kesejahteraan karyawan atau pemimpinya. Meskipun demikian, ada beberapa kelonggaran di balik pembatasan seperti itu. Yang pertama adalah bahwa tidak ada larangan bagi organisasi nirlaba untuk memberikan kompensasi kepada karyawannya sebagai kompensasi atas kinerja mereka. Yang kedua adalah bahwa organisasi nirlaba dapat mencari keuntungan, tetapi bukan untuk didistribusikan, tetapi untuk digunakan untuk membiayai proyek tambahan. Selain itu, organisasi nirlaba tidak dikenakan pajak. Ada pendapat lain yang

mengatakan bahwa organisasi nirlaba sangat bergantung pada penyandang dana karena manajemennya harus dapat memberikan program dan pelayanan kepada publik sesuai dengan permintaan penyandang dana (Komang & Abidi, 2024).

2.2 ISAK 35

Menurut (Diviana, 2020) ISAK 35-Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan disahkan pada tanggal 11 April 2019 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Ini mengatur penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45), yang diubah pada tahun 2017 dan sekarang diganti menjadi ISAK 35, sebelumnya mengatur organisasi non-profit. PSAK 45 dan ISAK 35 berbeda dalam hal klasifikasi aset neto. Perbedaan utamanya adalah bahwa menggabungkan aset neto terikat permanen dan temporer menjadi aset neto dengan pembatasan (*with restrictions*) akan mengurangi kompleksitas, dan aset neto tidak terikat menjadi aset neto tanpa pembatasan (*without restrictions*). Akibatnya, ini akan membuat pengguna laporan keuangan lebih memahami dan mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Adapun komponen-komponen pada laporan keuangan yang berpedoma ISAK 35 adalah sebagai berikut

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan entitas nonlaba terdiri dari tiga unsur: aset, liabilitas, dan aset neto. Ada dua (atau dua) format laporan posisi keuangan, yang masing-masing memiliki keuntungan tertentu, seperti yang ditunjukkan dalam lampiran ISAK 35 (Gustani, 2021).

Ada dua format laporan posisi keuangan yang ditunjukkan sebagai contoh. Setiap format memiliki kelebihan sendiri.

1. Dalam format A, informasi tentang pos penghasilan komprehensif lain ditunjukkan secara terpisah sebagai bagian dari aset neto yang tidak terbatas penyedia sumber daya. Namun, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto yang dibatasi penggunaannya, entitas melaporkan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kelas aset neto yang dibatasi penggunaannya.

ENTITAS XYZ Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	xxxx	xxxx
Piutang bunga	xxxx	xxxx
Investasi jangka pendek	xxxx	xxxx
Aset lancar lain	xxxx	xxxx
Total Aset Lancar	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	xxxx	xxxx
Investasi jangka panjang	xxxx	xxxx
Aset tetap	xxxx	xxxx
Total Aset Tidak Lancar	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
TOTAL ASET	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	xxxx	xxxx
Utang jangka pendek	xxxx	xxxx
Total Liabilitas Jangka Pendek	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	xxxx	xxxx
Liabilitas imbalan kerja	xxxx	xxxx
Total Liabilitas Jangka Panjang	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
Total Liabilitas	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
ASET NETO		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya</i>		
Surplus akumulasian	xxxx	xxxx
Penghasilan komprehensif lain*)	xxxx	xxxx
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>		
Total Aset Neto	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>

Contoh Laporan Posisi Keuangan (Format A)

*) entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

(A) Lihat Laporan Perubahan Aset Neto.

Gambar. 2 Laporan Posisi Keuangan Format A

Sumber : (gustani, 2021)

2. Format B menyajikan data berdasarkan klasifikasi aset neto.

ENTITAS XYZ		
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	xxxx	xxxx
Piutang bunga	xxxx	xxxx
Investasi jangka pendek	xxxx	xxxx
Aset lancar lain	xxxx	xxxx
Total Aset Lancar	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	xxxx	xxxx
Investasi jangka panjang	xxxx	xxxx
Aset tetap	xxxx	xxxx
Total Aset Tidak Lancar	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
TOTAL ASET	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	xxxx	xxxx
Utang jangka pendek	xxxx	xxxx
Total Liabilitas Jangka Pendek	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	xxxx	xxxx
Liabilitas imbalan kerja	xxxx	xxxx
Total Liabilitas Jangka Panjang	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
Total Liabilitas	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
ASET NETO		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya**)</i>	xxxx	xxxx
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>	xxxx	xxxx
Total Aset Neto	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>

(B)

**) mencakup jumlah penghasilan komprehensif lain (entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya, misalnya, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

(B) Lihat Laporan Perubahan Aset Neto.

Gambar. 3 Laporan Posisi Keuangan Format B

Sumber : (Gustani, 2021)

2. Laporan Penghasilan Komprehensif

Dalam versi ISAK 35 dan PSAK 45, "Laporan Aktivitas" diganti dengan "Laporan Penghasilan Komprehensif". Laporan Penghasilan Komprehensif menggambarkan peningkatan dan penurunan

manfaat ekonomi entitas nonlaba yang berasal dari penerimaan, pendapatan, dan pengeluaran atau beban (Gustani, 2021).

ENTITAS XYZ Laporan Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	xxxx	xxxx
Jasa layanan	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx	xxxx
Lain-lain	xxxx	xxxx
Total Pendapatan	xxxx	xxxx
<i>Beban</i>		
Gaji dan upah	(xxxx)	(xxxx)
Jasa dan profesional	(xxxx)	(xxxx)
Administratif	(xxxx)	(xxxx)
Depresiasi	(xxxx)	(xxxx)
Bunga	(xxxx)	(xxxx)
Lain-lain	(xxxx)	(xxxx)
Total Beban (catatan E)	(xxxx)	(xxxx)
Surplus (Defisit)	xxxx	xxxx
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx	xxxx
Total Pendapatan	xxxx	xxxx
Surplus (Defisit)	xxxx	xxxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	xxxx	xxxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	xxxx	xxxx

Gambar. 4 Laporan Komprehensif

Sumber : (Gustani, 2021)

3. Laporan Perubahan Aset Neto

Pada laporan keuangan entitas bisnis, istilah Laporan Perubahan Aset Neto digunakan untuk mengganti istilah Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam entitas non-laba, aset neto terbagi menjadi dua kategori:

1. aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya
2. aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya.

Contoh format Laporan Perubahan Aset Neto berdasarkan lampiran ISAK 35 adalah sebagai berikut:

ENTITAS XYZ Laporan Perubahan Aset Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	xxxx	xxxx
<i>Surplus tahun berjalan</i>	xxxx	xxxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	xxxx	xxxx
Saldo akhir	xxxx	xxxx
Penghasilan Komprehensif Lain		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Penghasilan komprehensif tahun berjalan***)	xxxx	xxxx
Saldo akhir	xxxx	xxxx
Total	xxxx	xxxx
ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Surplus tahun berjalan	xxxx	xxxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	(xxxx)	(xxxx)
Saldo akhir	xxxx	xxxx
TOTAL ASET NETO	xxxx	xxxx

Ⓐ
Ⓑ

***) entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

Ⓐ Lihat Laporan Posisi Keuangan (Format A).
 Ⓑ Lihat Laporan Posisi Keuangan (Format B).

Gambar. 5 Laporan Perubahan Aset Neto

Sumber : (gustani, 2021)

4. Laporan Arus Kas

Menurut (Gustani, 2021) Laporan arus kas entitas nonlaba sama dengan laporan arus kas entitas bisnis, tetapi arus kas dibagi menjadi tiga aktivitas: aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Format laporan arus kas untuk entitas nonlaba berdasarkan ISAK 35 diberikan di bawah ini

ENTITAS XYZ Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
AKTIVITAS OPERASI		
Rekonsiliasi surplus (defisit) menjadi kas neto dari aktivitas operasi:		
Surplus	xxxx	xxxx
Penyesuaian untuk:		
Depresiasi	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi	(xxxx)	(xxxx)
	xxxx	xxxx
Penurunan piutang bunga	xxxx	xxxx
Penurunan dalam pendapatan diterima di muka	(xxxx)	(xxxx)
Penurunan dalam utang jangka pendek	(xxxx)	(xxxx)
Sumbangan yang dibatasi untuk investasi	(xxxx)	(xxxx)
Kas yang dihasilkan dari operasi	xxxx	xxxx
Pembayaran bunga	(xxxx)	(xxxx)
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	xxxx	xxxx
AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(xxxx)	(xxxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxxx	xxxx
Penerimaan hasil investasi	xxxx	xxxx
Pembelian investasi	(xxxx)	(xxxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	(xxxx)	(xxxx)
AKTIVITAS PENDANAAN		
<i>Penerimaan dari sumbangan dibatasi untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi (<i>endowment</i>)	xxxx	xxxx
Investasi dalam bangunan	xxxx	xxxx
	xxxx	xxxx
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>		
Pembayaran utang jangka panjang	(xxxx)	(xxxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	(xxxx)	(xxxx)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		
	xxxx	xxxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE		
	xxxx	xxxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE		
	xxxx	xxxx

Gambar. 6 Laporan Arus Kas

Sumber : (Gustani, 2021)

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibahas secara menyeluruh dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan B harus disajikan karena kebijakan

pengungkapan yang diwajibkan diuraikan dalam Catatan A. Informasi yang direkomendasikan untuk diungkapkan oleh entitas berorientasi nonlaba dapat ditemukan dalam catatan C, D, dan E. Jumlah totalnya mencapai jutaan rupiah. (Gustani, 2021)

2.3 Akuntabilitas

a. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah cara untuk mengelola keuangan perusahaan dengan jelas dan transparan, dan salah satu prinsip pengelolaan keuangan yang baik adalah sistem akuntabilitas. Akuntabilitas mengacu pada siapa dan apa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pemegang amanah bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab mereka. Sebagai bagian dari meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi, kegiatan organisasi yang baik dihasilkan oleh akuntabilitas (Maulida, 2021) selain itu tujuan dari akuntabilitas adalah untuk menemukan apa yang harus dipertanggungjawabkan atas tindakan yang terjadi dan membandingkannya dengan tindakan yang seharusnya terjadi. Adanya akuntabilitas tidak hanya berarti mencari siapa yang bertanggung jawab, tetapi juga membantu mencegah pelanggaran dilakukan oleh individu yang melanggar aturan organisasi. (Nafila, 2022)

Menurut (Subagya, 2023) Akuntabilitas dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal adalah cara untuk melaksanakan tugas dengan ikhlas dan memakmurkan masjid sebagai amanah. Pengurus memiliki tanggung jawab untuk menjaga masjid saat mereka menerima dan menjalankan amanah. Dengan kata lain, pengurus yang menerima amanah berusaha untuk menjaga masjid berjalan sesuai dengan rencananya, tanpa memperhatikan kepentingan kelompok tertentu. Meskipun masjid adalah tempat untuk berkumpul, pengurus membatasi akses orang-orang politik dengan kepentingan tertentu.
2. Akuntabilitas horizontal,
Akuntabilitas horizontal berarti akuntabilitas tanpa atasan dan bawahan terhadap publik secara keseluruhan atau terhadap lembaga lainnya. Pengurus bertanggung jawab atas keuangan masjid kepada jama'ah, dengan akuntabilitas horizontal, pihak lain yang memiliki kedudukannya sama tetapi memiliki hak untuk mengetahui hasil pengelolaan keuangan tersebut dipertanggungjawabkan. Pengurus masjid menerapkan praktik akuntabilitas kepada para jama'ah dengan menempatkan laporan keuangan masjid di papan informasi yang dapat dilihat oleh semua orang yang datang ke masjid baik itu jama'ah yang memberikan infaq dan sadaqah kepada masjid, pengurus yang ingin melihat perkembangan keuangan masjid, dan orang-orang dari wilayah lain yang datang untuk beribadah di masjid tersebut dapat melihat adanya akuntabilitas.

b. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas juga merupakan tolak ukur keberhasilan tujuan dan pencapaian cita-cita organisasi atau entitas tertentu. Ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan seberapa jauh suatu tujuan atau sasaran telah dicapai dengan mempertimbangkan semua aspeknya.

Berikut beberapa indikator kinerja di dalam akuntabilitas menurut (Mufidah, 2021) :

1. Input (Pemasukan)

Adalah suatu alat untuk mengukur jumlah atau jumlah sumber dana, material, atau sumber daya manusia yang masuk dan digunakan untuk melaksanakan program dan atau aktivitas.

2. Output (Pengeluaran)

Produk yang dihasilkan dari kegiatan atau program dengan masukan yang digunakan.

3. Outcome (hasil)

Tingkat keberhasilan yang dapat dicapai atas pengeluaran yang sudah dilakukan.

4. Benevit (Manfaat)

Ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur manfaat yang diperoleh, yang dapat dianggap sebagai nilai tambahan untuk jumlah hasil yang telah dihasilkan.

5. Laporan Keuangan

Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang mencatat semua transaksi yang melibatkan uang, baik input maupun output.

2.4 Transparansi

Menurut National Committee of Governance, "Transparansi berarti kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan". Selain itu, UNDP (*United Nations Development Program*) menyatakan bahwa "transparansi adalah tersedianya informasi secara bebas dan dapat diakses secara langsung kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. (Khairaturrahmi & Ibrahim, 2018)

Salah satu prinsip GCG yang selalu berhubungan dengan akuntabilitas adalah transparansi. Konsep GCG mengatakan bahwa transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan atau pengungkapan informasi yang relevan tentang suatu organisasi (Salsabila & Priantilianingtiasari, 2023). Ada metrik yang digunakan oleh prinsip transparansi untuk menentukan kualitas manajemen keuangan. Bagaimana informasi tentang keadaan keuangan perusahaan dapat diakses adalah indikator transparansi keuangan. (Mufidah, 2021).

Menurut penelitian (Suwarsih, 2021), ada empat cara untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan:

1. ketersediaan,
2. aksesibilitas
3. ketepatan waktu pengungkapan,
4. dan frekuensi pengungkapan atau publikasi informasi keuangan.

Menurut indikator tersebut, laporan keuangan berkala yang tepat waktu dan mudah dipahami yang menunjukkan bagaimana perusahaan mendayagunakan sumber dayanya adalah ukuran transparansi organisasi. Selain itu, salah satu kriteria transparansi adalah kemudahan mengakses informasi yang diperlukan. Ini dapat berupa publikasi mengenai rencana organisasi, sumber dana yang diperoleh, dan kegiatan organisasi yang dapat diakses publik melalui papan pengumuman atau media elektronik seperti situs web organisasi atau media sosial.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil
1	Rezeki et al., (2023)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Isak 35 Pada Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Untuk Kemakmuran (Studi Kasus Di Masjid Taqwa Muhammadiyah	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukan bahwa Masjid Taqwa Muhammadiyah sudah melakukan akuntabilitas laporan keuangan dengan baik yakni dengan memberi pengumuman tiap hari jumatnya sebelum khutbah sholat Jum'at, ini dilaksanakan sebagai upaya pengelola mesjid guna

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil
		Kp. Dadap Kota Medan)		mempertanggungjawabkan agar masyarakat lebih mempercayai terkait pengelolaan dana masjid namun Mesjid Taqwa Muhammadiyah belum adanya penerapan atas penyusunan laporan keuangan yang relevan dengan ISAK 35, sebab dalam membuat laporan keuangannya di mesjid Taqwa Muhammadiyah hanya mengarah pada laporan keuanganmesjid pada umumnya
2	Mahani Faiza Aulia, Yenni Samri Juliati Nasution, (2023)	Analisis Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid di Kecamatan Belawan Berdasarkan ISAK 35	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas keuangan masjid di Kecamatan Belawan sudah dilakukan dengan baik, begitupun dengan pengelolaan keuangannya. Namun, terjadi ketidaksesuaian pengelolaan keuangan masjid di Kecamatan Belawan dengan ISAK 35. Hal tersebut terjadi karena masih barunya peraturan ISAK 35 yang di sahkan pada tahun 2020 sehingga masih sangat asing untuk di dengar. Dan juga keterbatasannya pemahaman bendahara yang tidak memiliki latar belakang akuntansi menjadi alasan lain tidak diterapkannya ISAK 35 pada masjid-masjid di Kecamatan Belawan.

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil
3	Mursidah et al., (2023)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid : ISAK 35di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35, sehingga dapat ditarik kesimpulan Akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, masjid Al-Ikhlas, dan masjid Shalatul Falah masih sederhana hanya sebatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran masjid. Dalam menyajikan laporan keuangan juga masih sederhana yaitu format laporan pemasukan dan pengeluaran yang diumumkan menggunakan microphone sebelum dimulai sholat jumat, pencatatan yang dilakukan juga masih secara manualwalaupun telah menyajikan laporan keuangannya secara rinci.
4	Salsabila & Priantilianing tiasari, (2023)	Implementation of accountability and transparency in financial management of miftahul jannah mosque in blitar district based on Isak 35	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam hal akuntabilitas, takmir Masjid Agung Miftahul Jannah menyatakan bahwa mereka telah menyusun laporan keuangan secara cepat dan tepat. Dalam hal penerapan transparansi di Masjid Agung Miftahul Jannah, ini telah dilakukan dengan baik. Takmir telah mengadakan pertemuan

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil
				<p>rutin dengan seluruh pengurus masjid untuk menyusun rencana kerja tahunan untuk masing-masing seksi.</p> <p>Takmir mengatakan bahwa laporan keuangan Masjid Agung Miftahul Jannah masih dibuat secara konvensional menggunakan laporan pemasukan dan pengeluaran kas masjid yang dimasukkan ke dalam BKU (Buku Kas Umum). Sampai saat ini, laporan ini belum sesuai dengan persyaratan ISAK 35.</p>
5	Widianto & Widianti, (2023)	“Implementasi Isak 35 Dalam Pelaporan Keuangan Masjid Al-Hajj”	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif	<p>Hasil dari penelitian ini Pencatatan dan Penyajian laporan keuangan masih dilakukan sederhana. Pemasukan dan Pengeluaran hanya dicatat dalam sejumlah buku kemudian di ketik dalam selebar kertas kemudian dipublikasikan pada papan pengumuman yang tersedia dan menginformasikan sebelum pelaksanaan shalat jumat kepada jamaah Hal lainnya untuk sumber pendanaan didapatkan dari infaq jumat jamaah sebagai sumber utama dalam membiayai semua pengeluaran masjid, dan subsidi lain dari Pemerintah Daerah untuk renovasi serta membayar honor takmir, imam serta</p>

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil
				khatib bersifat tentatif, tidak hanya itu pentingnya sosialisasi dan pelatihan pengelolaan keuangan masjid sesuai dengan ISAK 35